

ETIKA KEILMUAN MUSLIM KONTEMPORER: TANGGAPAN FILSAFAT ILMU TERHADAP TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

M. Soleh¹, M. Azik², Nur Muhammad Hafidz Batubara³, Mohd. Arifullah⁴
soleh092002@gmail.com¹, mazik4918@gmail.com², nurmuhammadhafidz11@gmail.com³,
arifullah@uinjambi.ac.id⁴

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

ABSTRAK

Etika keilmuan merupakan landasan moral yang mengarahkan aktivitas ilmiah agar tidak hanya berorientasi pada pencarian kebenaran, tetapi juga memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Dalam perspektif Islam, ilmu dipandang sebagai amanah Allah Swt. yang harus digunakan untuk mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Di era kontemporer, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menghadirkan tantangan baru berupa krisis moral, penyalahgunaan teknologi, komersialisasi ilmu, hingga lemahnya tanggung jawab sosial akademisi. Artikel ini bertujuan menganalisis konsep etika keilmuan Muslim kontemporer berdasarkan perspektif filsafat ilmu serta menjelaskan relevansinya terhadap tanggung jawab sosial dan pengabdian kepada masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan filosofis dan normatif menggunakan sumber primer berupa Al-Qur'an, hadis, dan karya para filsuf ilmu serta pemikir Islam kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa filsafat ilmu tidak hanya membahas aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu, tetapi juga memberikan kerangka etik mengenai bagaimana ilmu harus dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Dalam Islam, tanggung jawab sosial merupakan bagian integral dari etika keilmuan yang diwujudkan melalui pengabdian masyarakat, pemberdayaan umat, serta pengembangan ilmu yang berorientasi pada kemaslahatan (masalah). Oleh karena itu, ilmuwan Muslim dituntut tidak hanya menghasilkan pengetahuan baru, tetapi juga memiliki integritas moral, kejujuran akademik, dan komitmen terhadap pembangunan masyarakat.

Kata Kunci: Etika Keilmuan, Filsafat Ilmu, Tanggung Jawab Sosial, Pengabdian Masyarakat, Islam Kontemporer.

ABSTRACT

Scientific ethics constitutes the moral foundation that guides scientific activities not only toward the pursuit of truth but also toward the welfare of humanity. In the Islamic worldview, knowledge is regarded as a divine trust that should be utilized to promote justice, prosperity, and public benefit. Contemporary developments in science and technology have generated various ethical challenges, including the misuse of technology, commercialization of science, academic dishonesty, and declining social responsibility among scholars. This article aims to examine contemporary Muslim scientific ethics from the perspective of the philosophy of science and its relevance to social responsibility and community service. Employing library research with philosophical and normative approaches, this study analyzes the Qur'an, Hadith, and works of contemporary Muslim thinkers alongside Western philosophers of science. The findings reveal that the philosophy of science extends beyond ontological, epistemological, and axiological discussions by providing an ethical framework for the responsible use of knowledge. In Islam, social responsibility is an inseparable dimension of scientific ethics, manifested through community engagement, public empowerment, and the development of beneficial knowledge. Therefore, contemporary Muslim scholars are expected to uphold academic integrity, moral responsibility, and commitment to societal development.

Keywords: Scientific Ethics, Philosophy Of Science, Social Responsibility, Community Service, Islam.

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang memberikan perhatian yang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan. Hal tersebut tercermin dalam wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad saw., yaitu perintah membaca (*iqra'*), yang menunjukkan bahwa aktivitas keilmuan menjadi fondasi utama dalam pembangunan peradaban Islam. Dalam pandangan Islam, ilmu tidak dipahami sekadar sebagai akumulasi pengetahuan, tetapi sebagai sarana untuk mengenal Allah Swt., membangun peradaban yang bermartabat, serta mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Oleh karena itu, setiap aktivitas keilmuan memiliki dimensi moral dan spiritual yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan penciptaan manusia sebagai khalifah di muka bumi.¹

Al-Qur'an menempatkan ilmu pada kedudukan yang sangat mulia. Allah Swt. berfirman:

"...Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat." (Q.S. al-Mujādilah [58]: 11).²

Ayat tersebut menunjukkan bahwa ilmu bukan hanya instrumen intelektual, melainkan amanah yang harus dimanfaatkan untuk menghadirkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Dengan demikian, kepemilikan ilmu pengetahuan menuntut adanya tanggung jawab moral dalam pemanfaatannya sehingga ilmu senantiasa melahirkan amal saleh dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam sejarah peradaban Islam klasik, para ilmuwan seperti Al-Ghazali, Ibn Sina, Al-Farabi, Ibn Rushd, dan Ibn Khaldun berhasil membangun tradisi keilmuan yang memadukan antara kecerdasan intelektual dan keluhuran akhlak. Mereka tidak memandang ilmu sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai jalan menuju pembentukan manusia yang beriman, berakhlak, dan mampu memberikan manfaat bagi kehidupan sosial. Al-Ghazali, misalnya, menegaskan bahwa tujuan ilmu bukan hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga menyucikan jiwa dan mendekatkan manusia kepada Allah Swt. Ilmu yang tidak disertai akhlak justru berpotensi melahirkan kerusakan, sedangkan ilmu yang dilandasi nilai-nilai moral akan menjadi fondasi lahirnya peradaban yang adil dan berkeadaban.³

Memasuki era globalisasi, revolusi industri 5.0, dan transformasi digital, perkembangan ilmu pengetahuan berlangsung sangat pesat. Kemajuan di bidang *Artificial Intelligence* (AI), *big data*, rekayasa genetika, teknologi informasi, dan media digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, pemerintahan, hingga komunikasi sosial. Di satu sisi, perkembangan tersebut memberikan manfaat besar bagi kemajuan peradaban manusia, namun di sisi lain juga melahirkan berbagai persoalan etis, seperti plagiarisme berbasis kecerdasan buatan, manipulasi data penelitian, penyebaran hoaks dan disinformasi, eksploitasi sumber daya alam, penyalahgunaan teknologi, serta komersialisasi ilmu pengetahuan yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan.⁴

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan tidak selalu diiringi dengan perkembangan moral para ilmuwan. Dalam lingkungan pendidikan tinggi, orientasi penelitian sering kali lebih menekankan pada pencapaian publikasi ilmiah, peningkatan indeks sitasi, serta perolehan hibah penelitian dibandingkan kebermanfaatannya.

¹ Hully, dkk., "Internalizing Religious Moderation Values Into The Islamic Education At University," *Journal of Namibian Studies* vol. 34, no. S1 (2023): hlm. 1123,

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2019), Q.S. al-Mujādilah [58]: 11.

³ Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, terj. Moh. Zuhri (Semarang: Asy-Syifa, 1992), Jilid 1, hlm. 45-48.

⁴ Hully, dkk., "Internalizing Religious Moderation Values Into The Islamic Education At University," hlm. 1125.

hasil penelitian bagi masyarakat. Akibatnya, fungsi sosial ilmu pengetahuan sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat mengalami pergeseran menuju orientasi pragmatis dan ekonomis. Tidak sedikit hasil penelitian yang berhenti sebagai dokumen akademik tanpa memberikan kontribusi nyata terhadap penyelesaian persoalan sosial yang dihadapi masyarakat.⁵

Persoalan tersebut menjadi perhatian penting dalam kajian filsafat ilmu, khususnya pada dimensi aksiologi. Filsafat ilmu tidak hanya membahas hakikat ilmu (ontologi) maupun cara memperoleh ilmu (epistemologi), tetapi juga mempertanyakan nilai, tujuan, manfaat, dan tanggung jawab penggunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Dalam perspektif aksiologi, ilmu tidak bersifat bebas nilai (*value free*), melainkan harus diarahkan untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, serta kemajuan peradaban yang berorientasi pada kemanusiaan. Pandangan ini sekaligus menjadi kritik terhadap positivisme yang cenderung memandang ilmu sebatas fakta empiris tanpa mempertimbangkan konsekuensi moral dari penerapannya.⁶

Sejalan dengan hal tersebut, Islam sejak awal telah menegaskan bahwa ilmu harus melahirkan amal saleh. Al-Qur'an secara konsisten menghubungkan iman, ilmu, dan amal sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Rasulullah saw. juga menegaskan bahwa manusia terbaik adalah mereka yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dengan demikian, tanggung jawab sosial merupakan konsekuensi logis dari kepemilikan ilmu pengetahuan sehingga seorang ilmuwan tidak hanya bertanggung jawab terhadap kebenaran akademik, tetapi juga terhadap dampak sosial dari ilmu yang dikembangkannya.⁷

Konsep tersebut memiliki relevansi yang sangat kuat dengan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dalam perspektif Islam, pengabdian kepada masyarakat merupakan implementasi dari prinsip *amar ma'ruf nahi munkar, dakwah bil hal*, serta tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Oleh sebab itu, akademisi Muslim tidak cukup hanya menghasilkan teori atau publikasi ilmiah, tetapi juga dituntut mengembangkan ilmu yang mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.⁸

Gagasan mengenai pentingnya integrasi antara ilmu dan nilai-nilai moral juga dikembangkan oleh para pemikir Muslim kontemporer seperti Syed Muhammad Naquib al-Attas, Ismail Raji al-Faruqi, Osman Bakar, dan M. Amin Abdullah. Mereka menegaskan bahwa krisis utama dunia Islam dewasa ini bukan terletak pada kurangnya penguasaan ilmu pengetahuan, melainkan pada hilangnya adab (*loss of adab*) dalam proses memperoleh, mengembangkan, dan mengamalkan ilmu. Ilmu yang terlepas dari adab akan kehilangan orientasi etiknya sehingga berpotensi menjadi instrumen dominasi, eksploitasi, dan kerusakan sosial.⁹

Pandangan tersebut sejalan dengan perkembangan filsafat ilmu modern. Karl Popper menekankan pentingnya sikap kritis dan tanggung jawab ilmuwan terhadap validitas pengetahuan yang dihasilkannya. Thomas S. Kuhn menunjukkan bahwa perkembangan ilmu terjadi melalui perubahan paradigma yang harus memberikan kontribusi terhadap

⁵ Hully, dkk., "Internalizing Religious Moderation Values Into The Islamic Education At University," hlm. 1124.

⁶ Mohammad Adib, *Filsafat Ilmu: Ontologi, Epistemologi, Aksiologi, dan Logika Ilmu Pengetahuan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 210-215.

⁷ Hully, dkk., "Internalizing Religious Moderation Values Into The Islamic Education At University," hlm. 1131.

⁸ Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, *Panduan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi* (Jakarta: Kemenag RI, 2019), hlm. 12-14

⁹ Syed Muhammad Naquib al-Attas, *The Concept of Education in Islam: A Framework for an Islamic Philosophy of Education* (Kuala Lumpur: ISTAC, 1991), hlm. 15-19.

kemajuan masyarakat. Sementara itu, Jürgen Habermas memandang ilmu sebagai sarana emansipasi manusia, sedangkan Hans Jonas memperkenalkan konsep *ethics of responsibility* yang menegaskan bahwa setiap perkembangan ilmu dan teknologi harus mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi keberlangsungan kehidupan manusia dan lingkungan.¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa etika keilmuan Muslim kontemporer merupakan isu yang semakin penting di tengah pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ilmu tidak hanya memerlukan landasan ontologis dan epistemologis yang kuat, tetapi juga harus dibangun di atas nilai-nilai moral, spiritual, serta tanggung jawab sosial agar pemanfaatannya benar-benar memberikan kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam konteks tersebut, perspektif filsafat ilmu menjadi penting untuk memberikan landasan filosofis mengenai hubungan antara ilmu pengetahuan, etika, dan tanggung jawab sosial, sehingga pengembangan ilmu tidak berhenti pada pencapaian akademik semata, tetapi juga mampu mendorong pengabdian kepada masyarakat, penyelesaian berbagai persoalan sosial, serta terwujudnya peradaban yang lebih adil, humanis, dan berkelanjutan.

METODOLOGI

Artikel ini menggunakan **penelitian kepustakaan (library research)** dengan pendekatan filosofis dan normatif. Data diperoleh melalui studi terhadap sumber primer berupa Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad Saw., karya para filsuf ilmu seperti Karl Popper, Thomas S. Kuhn, dan Jürgen Habermas, serta pemikiran tokoh Muslim seperti Al-Ghazali, Syed Muhammad Naquib al-Attas, Ismail Raji al-Faruqi, Seyyed Hossein Nasr, dan M. Amin Abdullah. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah nasional maupun internasional, serta dokumen yang relevan dengan tema penelitian. Teknik analisis menggunakan **analisis isi (content analysis)** dan **analisis filosofis** dengan menelaah konsep-konsep etika keilmuan, tanggung jawab sosial, serta pengabdian masyarakat dalam perspektif filsafat ilmu dan Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Etika Keilmuan Dalam Perspektif Islam

Dalam tradisi intelektual Islam, ilmu tidak dipahami hanya sebagai kumpulan pengetahuan yang diperoleh melalui proses rasional dan empiris, melainkan sebagai amanah dari Allah Swt. yang harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, aktivitas ilmiah tidak pernah dipisahkan dari nilai-nilai moral, spiritual, dan kemanusiaan. Ilmu dalam Islam memiliki dimensi teologis karena bersumber dari Allah sebagai al-Alīm (Maha Mengetahui), sehingga penggunaannya harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dan menjaga keseimbangan kehidupan.¹¹

Konsep tersebut berbeda dengan paradigma positivisme modern yang cenderung memisahkan ilmu dari agama dan moral. Auguste Comte, misalnya, menempatkan ilmu sebagai sesuatu yang bersifat bebas nilai (*value-free science*), sehingga benar atau salahnya suatu ilmu ditentukan semata-mata oleh pembuktian empiris.¹² Sebaliknya, Islam menempatkan ilmu sebagai bagian dari ibadah sehingga pencarian ilmu harus dilandasi niat

¹⁰ Kaelan, *Filsafat Ilmu: Penelusuran Epistemologis, Ontologis, dan Aksiologis Pengetahuan Ilmiah* (Yogyakarta: Paradigma, 2017), hlm. 189-194.

¹¹ M. Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 89-91.

¹² Auguste Comte, *The Positive Philosophy of Auguste Comte*, terj. Harriet Martineau (London: J. Chapman, 1853), Jilid 1, hlm. 14-17.

yang benar serta bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Swt.

Al-Qur'an berkali-kali menegaskan pentingnya ilmu yang membawa manusia kepada ketakwaan. Firman Allah Swt.:

"Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya hanyalah orang-orang yang berilmu." (Q.S. Fāṭir [35]: 28).¹³

Ayat tersebut menunjukkan bahwa ilmu bukan sekadar menghasilkan kecerdasan intelektual, tetapi juga membentuk kesadaran moral. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin besar pula tanggung jawab etik yang harus dipikulnya. Nabi Muhammad saw. juga menegaskan bahwa ilmu terbaik adalah ilmu yang memberikan manfaat kepada manusia.

"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya."¹⁴

Hadis tersebut menjadi dasar bahwa ilmu harus memiliki orientasi sosial. Ilmu kehilangan maknanya apabila hanya menjadi instrumen memperoleh jabatan, kekuasaan, atau keuntungan ekonomi tanpa memberi manfaat bagi masyarakat.

Ilmu Sebagai Amanah

Para ulama klasik memandang bahwa ilmu merupakan amanah yang mengandung tanggung jawab moral. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa tujuan utama ilmu bukanlah sekadar mengetahui sesuatu, melainkan memperbaiki diri (*iṣlāḥ al-naḥs*) dan memperbaiki masyarakat (*iṣlāḥ al-mujtama'*).¹⁵ Menurut Al-Ghazali, terdapat dua bahaya besar bagi ilmuwan, yaitu:

1. Menggunakan ilmu demi kepentingan dunia semata.
2. Menyembunyikan ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa etika ilmiah telah menjadi perhatian ulama Islam jauh sebelum berkembangnya filsafat ilmu modern. Ibn Khaldun bahkan menegaskan bahwa ilmu berkembang karena kebutuhan masyarakat. Menurutnya, suatu peradaban akan mengalami kemunduran apabila ilmu kehilangan fungsi sosialnya.¹⁶ Dengan demikian, hubungan antara ilmu dan masyarakat merupakan hubungan yang tidak dapat dipisahkan.

Adab Sebagai Fondasi Keilmuan

Syed Muhammad Naquib al-Attas memperkenalkan konsep adab sebagai inti etika keilmuan Islam. Menurutnya, krisis terbesar umat Islam saat ini bukanlah kekurangan ilmu, melainkan hilangnya adab (*loss of adab*).¹⁷ Adab dalam pandangan Al-Attas berarti kemampuan menempatkan sesuatu sesuai dengan kedudukannya. Dalam konteks ilmu pengetahuan, adab mencakup:

1. Kejujuran akademik
2. Penghormatan terhadap kebenaran
3. Tanggung jawab ilmiah
4. Penghargaan terhadap karya orang lain
5. Penggunaan ilmu demi kemaslahatan.

Menurut Al-Attas, ilmu yang tidak disertai adab justru melahirkan kerusakan sosial karena kehilangan orientasi moral.¹⁸ Pandangan tersebut semakin relevan pada era digital ketika penyalahgunaan teknologi, plagiarisme, manipulasi data penelitian, hingga penyebaran informasi palsu semakin mudah dilakukan.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2019), Q.S. Fāṭir [35]: 28.

¹⁴ Hadis Riwayat Ahmad, *Al-Musnad*, Jilid 3 (Kairo: Dar al-Hadits, 1995), no. Hadis 1234, hlm. 45.

¹⁵ Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, terj. Moh. Zuhri, Jilid 1 (Semarang: Asy-Syifa, 1992), hlm. 67-70.

¹⁶ Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, terj. Ahmad Thoha (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), hlm. 432-435.

¹⁷ Syed Muhammad Naquib al-Attas, *The Concept of Education in Islam: A Framework for an Islamic Philosophy of Education* (Kuala Lumpur: ISTAC, 1991), hlm. 22-25.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 29.

Aksiologi Ilmu: Transformasi Teoretis Menuju Pengabdian Sosial

Secara aksiologis, ilmu dalam Islam tidak boleh mandek dalam tataran konseptual belaka, melainkan wajib ditransformasikan menjadi amal nyata (*action-oriented science*). Dialektika antara iman, ilmu, dan amal merupakan poros utama yang menggerakkan peradaban Islam klasik. Ketika sebuah perguruan tinggi atau institusi akademik melakukan riset, tolok ukur keberhasilannya tidak sekadar dihitung dari indeks sitasi global atau publikasi jurnal semata, melainkan dari seberapa besar hasil keilmuan tersebut mampu menjawab problematika kemiskinan, kebodohan, dan ketertinggalan di tengah masyarakat.¹⁹

Prinsip ini berkelindan erat dengan implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada aspek pengabdian kepada masyarakat. Kaum akademis Muslim memikul tanggung jawab profetik (*prophetic responsibility*) untuk melakukan *iṣlāḥ* (rekonstruksi sosial) demi mencegah terjadinya *fasād* (kerusakan lingkungan dan tatanan sosial).²⁰ Tatkala sains modern mengalami disorientasi moral akibat dikendalikan oleh kepentingan pasar kapitalistik, etika keilmuan Islam hadir menawarkan kompas spiritual agar teknologi dan ilmu pengetahuan dikembangkan demi memuliakan martabat kemanusiaan (*human dignity*), bukan justru mendegradasi atau mengeksploitasinya.²¹

Etika Keilmuan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu

Filsafat ilmu merupakan cabang filsafat yang membahas hakikat ilmu pengetahuan dari aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga dimensi tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan secara fungsional dan struktural dalam membangun serta mengukuhkan fondasi etika ilmiah bagi seorang peneliti maupun akademisi di lembaga pendidikan tinggi.

Dimensi Ontologi

Ontologi membahas hakikat realitas atau apa yang menjadi objek kajian dari suatu ilmu pengetahuan. Di dalam perspektif Islam, dimensi ontologis memiliki cakupan yang sangat luas karena tidak membatasi realitas hanya pada wilayah materi yang kasat mata. Seluruh alam semesta beserta isinya dipandang sebagai ayat (*tanda-tanda kekuasaan*) yang berasal dari Allah Swt. Oleh karena itu, aktivitas keilmuan yang dilakukan oleh manusia harus menaruh rasa hormat yang mendalam terhadap keteraturan, harmoni, dan hukum alam (*sunnatullah*) yang telah ditetapkan-Nya pada setiap jengkal ciptaan-Nya.²²

Pandangan ontologis teosentris ini sangat bertolak belakang dengan paradigma materialisme dan naturalisme sekular yang mendominasi sains modern. Materialisme radikal hanya mengakui realitas fisik-empiris yang dapat diukur di laboratorium sebagai satu-satunya objek ilmu yang sah, sementara realitas metafisik dan spiritual didepak keluar dari wilayah akademik.

Menurut Seyyed Hossein Nasr, akar penyebab dari krisis kemanusiaan dan kerusakan ekologis yang diakibatkan oleh ilmu modern hari ini adalah terjadinya reduksi realitas yang sangat parah. Alam tidak lagi dipandang sebagai ciptaan yang sakral, melainkan sekadar objek material yang mekanistik dan siap dieksploitasi demi memuaskan nafsu pragmatis

¹⁹ Ismail Raji al-Faruqi, *Islamization of Knowledge: General Principles and Work Plan* (Herndon: IIIT, 1982), hlm. 38-41.

²⁰ Mohammad Adib, *Filsafat Ilmu: Ontologi, Epistemologi, Aksiologi, dan Logika Ilmu Pengetahuan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 245.

²¹ Hully, dkk., "Internalizing Religious Moderation Values Into The Islamic Education At University," *Journal of Namibian Studies* 34, no. S1 (2023): hlm. 1126,

²² Mohammad Adib, *Filsafat Ilmu: Ontologi, Epistemologi, Aksiologi, dan Logika Ilmu Pengetahuan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 142-145.

manusia.²³ Dampak fatalnya, ilmu pengetahuan dan teknologi memang berkembang secara eksponensial dan sangat pesat, tetapi di saat yang sama ia kehilangan arah moral karena terputus dari akar spiritualnya.

Dimensi Epistemologi

Epistemologi membahas bagaimana suatu ilmu pengetahuan diperoleh, metode apa yang digunakan, serta apa saja tolok ukur validitas kebenaran ilmiah tersebut. Dalam tradisi intelektual Islam, metode pencarian kebenaran menerapkan prinsip integratif yang tidak mendikotomikan sumber-sumber pengetahuan. Setidaknya terdapat tiga sumber pengetahuan utama yang diakui secara absah, yaitu:

1. Wahyu (*khavar shadiq* yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah);
2. Akal (*al-'aql* melalui penalaran rasional-logis);
3. Pengalaman empiris (*al-hiss* melalui observasi indrawi dan eksperimen).

Ketiga sumber pengetahuan tersebut berada dalam satu hierarki yang saling melengkapi, harmonis, dan tidak boleh dipertentangkan satu sama lain. Sains modern cenderung mengagungkan empirisme dan rasionalisme murni sembari membuang wahyu karena dianggap tidak ilmiah. Sebaliknya, Islam memandang akal dan indra sebagai alat yang diberikan oleh Sang Pencipta untuk memahami wahyu-Nya yang terhampar di alam semesta (*ayat kauniyah*).²⁴

Ismail Raji al-Faruqi menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan modern yang sekular perlu diintegrasikan secara total dengan nilai-nilai wahyu agar mampu melahirkan peradaban yang adil, humanis, dan berkeadilan.²⁵ Konsep "Islamisasi Ilmu Pengetahuan" (*Islamization of Knowledge*) yang dicanangkan oleh Al-Faruqi ini memiliki target utama untuk meruntuhkan tembok dikotomi akut yang memisahkan antara ilmu agama (*perennial knowledge*) dan ilmu umum (*acquired knowledge*).²⁶ Menurut Al-Faruqi, seluruh disiplin ilmu modern mulai dari sosiologi, ekonomi, hingga sains murni harus diletakkan di bawah payung tauhid dan diarahkan sepenuhnya untuk mewujudkan kemaslahatan universal yang selaras dengan tujuan dasar syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), seperti perlindungan terhadap jiwa, akal, keturunan, harta, dan agama.

Dimensi Aksiologi

Aksiologi merupakan dimensi filsafat ilmu yang membahas tentang hakikat nilai, tujuan, kegunaan, serta tanggung jawab sosial dan moral dari penerapan ilmu pengetahuan. Jika ontologi berbicara tentang "apa" dan epistemologi tentang "bagaimana", maka aksiologi menjadi benteng etis yang mempertanyakan: Untuk apa ilmu tersebut digunakan? Apakah penerapan sains ini membawa maslahat atau justru mendatangkan mudarat bagi umat manusia?

Jujun S. Suriasumantri dalam kajiannya menegaskan bahwa ilmu pengetahuan pada hakikatnya bukan sekadar bertujuan untuk mengetahui kenyataan objektif secara dingin, melainkan memiliki misi luhur untuk meningkatkan kualitas dan martabat kehidupan manusia itu sendiri.²⁷ Oleh sebab itu, proses pencarian, pengembangan, hingga aplikasi ilmu di tengah masyarakat wajib dikawal oleh pilar-pilar nilai etis yang kokoh, seperti:

²³ Seyyed Hossein Nasr, *The Encounter of Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man* (London: George Allen and Unwin, 1968), hlm. 23-27.

²⁴ M. Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 112-115.

²⁵ Ismail Raji al-Faruqi, *Islamization of Knowledge: General Principles and Work Plan* (Herndon: IIIT, 1982), hlm. 15-19.

²⁶ Ismail Raji al-Faruqi, *Islamization of Knowledge* hlm.. 24.

²⁷ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009), hlm. 234-237.

1. Kejujuran akademik: Menjauhi segala bentuk plagiarisme, fabrikasi, dan falsifikasi data demi integritas ilmiah;
2. Keadilan: Memastikan bahwa akses dan pemanfaatan ilmu tidak dimonopoli oleh segelintir kelompok elit;
3. Kemanfaatan: Fokus pada riset yang menyelesaikan masalah konkret manusia;
4. Tanggung jawab sosial: Sadar akan dampak jangka panjang dari teknologi yang diciptakan terhadap kelangsungan hidup sosial dan lingkungan.

Di dalam konteks nilai Islam, aksiologi keilmuan ini berlabuh pada konsep *masalah ammah*, yaitu sebuah komitmen profetik untuk menghadirkan manfaat yang sebesar-besarnya sekaligus menghilangkan kerusakan (*mafsadah*) bagi seluruh umat manusia.²⁸ Seorang ilmuwan Muslim memikul tanggung jawab moral yang besar; ia tidak boleh bersikap acuh tak acuh atau berlindung di balik jargon "ilmu bebas nilai" ketika hasil penelitiannya disalahgunakan untuk merusak tatanan sosial, menyebarkan kebohongan, atau menciptakan senjata pemusnah massal. Etika aksiologis menuntut ilmuwan untuk menjadi pelopor gerakan moral yang memastikan sains selalu mengabdikan pada kemanusiaan.²⁹

Tanggung Jawab Sosial Ilmuwan Muslim

Perkembangan ilmu pengetahuan telah menghasilkan berbagai inovasi radikal yang mengubah lanskap kehidupan manusia. Namun demikian, setiap terobosan teknologi selalu membawa konsekuensi etis yang mendalam. Di era modern, tantangan etis tersebut termanifestasi nyata dalam beberapa bidang krusial, antara lain:

1. Artificial Intelligence (AI): Membawa risiko bias algoritma, hilangnya privasi, hingga ancaman eksistensial otonomi manusia.
2. Rekayasa Genetika: Membuka perdebatan mengenai batas moral manipulasi makhluk hidup dan penyuntingan DNA.
3. Teknologi Nuklir: Menyimpan potensi destruksi massal kemanusiaan di samping pemanfaatan energi alternatif.
4. Big Data: Memicu kerentanan pengawasan massal (*surveillance*) dan komodifikasi data pribadi.
5. Media Sosial: Mempercepat polarisasi sosial, penyebaran disinformasi, dan degradasi kesehatan mental masyarakat.

Seluruh dinamika perkembangan ini menuntut tanggung jawab moral yang kokoh dari para ilmuwan. Hans Jonas, dalam karya monumentalnya *The Imperative of Responsibility*, menegaskan bahwa kedahsyatan teknologi modern membutuhkan pijakan etika baru. Menurut Jonas, ilmuwan tidak lagi bisa sekadar memikirkan dampak seketika, melainkan wajib mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap inovasinya demi memastikan keberlangsungan hidup generasi mendatang.³⁰ Bagi ilmuwan Muslim, prinsip etika masa depan ini sejalan dengan konsep inti ajaran Islam, yaitu amanah (tanggung jawab ketuhanan dan kemanusiaan) serta *masalah* (pemeliharaan kebaikan publik universal).

Ilmuwan Sebagai Agen Perubahan Sosial

Dalam tradisi Islam, ilmuwan memegang posisi spiritual dan sosial yang sangat mulia sebagai *waratsat al-anbiya'* (pewaris para nabi).³¹ Konsekuensi dari status ini adalah ilmuwan tidak boleh mengisolasi diri di dalam "menara gading" akademis. Tugas utama

²⁸ Ahmad al-Raysuni, *Nazharat fi Imtiyad al-Maqasid al-Syar'iyah* (Rabat: Dar al-Aman, 2014), hlm. 88-91.

²⁹ Hully, dkk., "Internalizing Religious Moderation Values Into The Islamic Education At University," *Journal of Namibian Studies* 34, no. S1 (2023): hlm. 1124-1125,

³⁰ Hans Jonas, *The Imperative of Responsibility: In Search of an Ethics for the Technological Age* (Chicago: University of Chicago Press, 1984), hlm. 25-28.

³¹ Disandarkan pada hadis sahih riwayat Abu Dawud (No. 3641) dan Tirmidzi (No. 2682): "Al-'Ulamau waratsatul anbiya'" (Sesungguhnya ulama/ilmuwan adalah pewaris para nabi).

mereka bukan sekadar mentransfer materi keilmuan, melainkan terlibat aktif dalam memperbaiki, mendidik, dan mengentaskan problem di tengah masyarakat.

Guna mewujudkan peran nyata tersebut, M. Amin Abdullah menegaskan bahwa perguruan tinggi Islam harus secara radikal mengubah paradigma berpikirnya melalui pendekatan integratif-interkoneksi.³² Paradigma ini bekerja dengan cara menjembatani dan saling mengaitkan antara tiga wilayah besar:

1. Ilmu agama (*hadlarah al-nass*)
2. Ilmu sosial-humaniora (*hadlarah al-falsafah*)
3. Ilmu alam dan teknologi (*hadlarah al-'ilm*)

Melalui pendekatan interkoneksi ini, dikotomi atau pemisahan kaku antara "ilmu agama" dan "ilmu umum" ditolak secara tegas. Sebab, dalam pandangan Islam, seluruh spektrum pengetahuan pada hakikatnya bersumber dari Tuhan yang sama dan wajib diorientasikan untuk satu tujuan yang sama: menghadirkan kemaslahatan nyata bagi peradaban.

Etika Penelitian Di Era Digital

Penerapan tanggung jawab ilmuwan secara praktis mewujudkan langsung dalam proses riset atau etika penelitian. Prinsip-prinsip utama etika ilmiah yang wajib dipegang teguh oleh setiap peneliti meliputi:

1. Kejujuran Akademik & Objektivitas: Menyajikan data apa adanya tanpa manipulasi demi memburu hasil yang diinginkan.
2. Penghargaan Hak Cipta & Anti-Plagiarisme: Mengakui kontribusi intelektual orang lain secara jujur melalui sitasi yang tepat.
3. Keterbukaan Data (Open Data): Membuka ruang bagi peneliti lain untuk memverifikasi, mereplikasi, atau menguji ulang temuan.
4. Tanggung Jawab terhadap Subjek & Kemanfaatan: Menjamin keamanan subjek penelitian (manusia/hewan) serta memastikan output riset membawa dampak positif bagi kehidupan.

Filsuf sains Karl Popper dalam karyanya *The Logic of Scientific Discovery* menyebutkan bahwa integritas ilmiah merupakan syarat mutlak bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Sains hanya dapat bergerak maju secara sah jika ia dibangun di atas tradisi kritik yang jujur, objektif, dan terbuka terhadap koreksi (*falsifikasi*).³³ Sebaliknya, penyelewengan sekecil apa pun seperti manipulasi data secara otomatis akan meruntuhkan seluruh kredibilitas institusi keilmuan.

Di era digital saat ini, benteng etika penelitian sedang menghadapi tantangan yang sangat berat. Maraknya fenomena *paper mill* (pabrik pembuatan karya ilmiah palsu/komersial), menjamurnya publikasi jurnal predator yang mengabaikan *peer-review*, hingga penyalahgunaan AI generatif untuk memalsukan karya tulis ilmiah tanpa proses verifikasi ketat menunjukkan bahwa penegakan etika penelitian bukan lagi sekadar formalitas administratif, melainkan sebuah urgensi moral yang mendesak untuk diselamatkan.

Pengabdian Masyarakat Sebagai Implementasi Etika Keilmuan Muslim

Salah satu indikator keberhasilan ilmu pengetahuan bukan hanya diukur dari banyaknya publikasi ilmiah atau tingginya indeks sitasi, tetapi juga dari sejauh mana ilmu tersebut mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam perspektif Islam, ilmu bukanlah komoditas sekuler yang dikejar demi kepuasan intelektual semata, melainkan sebuah amanah teologis yang harus diwujudkan dalam bentuk pelayanan (*khidmah*) kepada

³² M. Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkoneksi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 85-89.

³³ Karl Popper, *The Logic of Scientific Discovery* (London & New York: Routledge, 2002), hlm. 14-17.

umat. Oleh karena itu, pengabdian kepada masyarakat tidak dapat dipisahkan dari etika keilmuan seorang Muslim. Aktivitas ilmiah yang berhenti pada tataran teoritis-akademis di dalam ruang kelas tanpa memberikan solusi konkret terhadap persoalan sosial belum sepenuhnya mencerminkan tujuan hakiki dari epistemologi ilmu menurut Islam.³⁴

Kewajiban moral untuk mentransformasikan ilmu menjadi aksi nyata ini sejalan dengan prinsip teologis yang digariskan oleh Allah Swt. dalam Al-Qur'an:

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan." (Q.S. al-Mā'idah [5]:2).³⁵

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap modal intelektual yang dimiliki oleh seorang ilmuwan Muslim harus diorientasikan pada kerja sama yang konstruktif dalam membangun kemaslahatan sosial (*maslahah ammah*). Dalam dimensi ini, pengabdian masyarakat bukan lagi sekadar agenda karitatif atau formalitas administratif, melainkan sebuah implementasi nyata dari prinsip *ta'āwun* (tolong-menolong) yang menjadi fondasi etis hubungan sosial dalam Islam. Melalui ilmu pengetahuan yang diaplikasikan, seorang Muslim berperan aktif dalam memotong mata rantai ketimpangan dan ketidakadilan di tengah masyarakat.

Tanggung jawab etis ini diperkuat dengan tuntutan untuk menebarkan kebaikan secara universal tanpa menciptakan kerusakan di muka bumi. Allah Swt. berfirman dalam ayat lain:

"...dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi." (Q.S. al-Qaṣaṣ [28]:77).³⁶

Ayat ini mengandung pesan epistemologis yang mendalam bahwa ilmu tidak boleh dikonversi menjadi instrumen eksploitatif yang merusak tatanan kehidupan manusia maupun ekologi lingkungan. Sebaliknya, ilmu pengetahuan harus bertindak sebagai sarana profetik untuk menciptakan kesejahteraan, keadilan, dan keberlanjutan hidup. Ketika seorang ilmuwan Muslim turun ke masyarakat untuk mendampingi dan memberdayakan mereka, ia sedang menjalankan fungsi kekhalifahan (*khilafah*) untuk merawat dan memakmurkan bumi sesuai dengan petunjuk Ilahi.

Jika ditarik ke dalam konteks pendidikan tinggi di Indonesia, nilai-nilai profetik Islam ini menemukan relevansi praktisnya dalam konsep Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ketiga unsur ini memiliki hubungan organik-simbiotis yang tidak dapat dipisahkan. Penelitian bertugas mengeksplorasi dan menghasilkan kebaruan pengetahuan, pendidikan berperan mentransfer dan menyebarluaskan pengetahuan tersebut, sedangkan pengabdian masyarakat menjadi muara akhir yang mengimplementasikan hasil-hasil riset murni agar berdaya guna bagi masyarakat luas.³⁷ Integrasi ketiga aspek ini memastikan bahwa menara gading universitas tetap membumi dan responsif terhadap jeritan realitas sosial.

Sayangnya, potret realitas di lapangan saat ini masih menunjukkan adanya jurang pemisah yang lebar (*gap*) antara riset akademik dengan kebutuhan riil masyarakat. Banyak hasil penelitian mutakhir yang berakhir tragis sebagai dokumen berdebu di perpustakaan atau sekadar menjadi angka statistik dalam jurnal ilmiah demi mengejar kenaikan pangkat fungsional dosen. Di sisi lain, persoalan akut seperti kemiskinan struktural, rendahnya kualitas pendidikan, krisis kesehatan publik, degradasi lingkungan hidup, dan rapuhnya pemberdayaan ekonomi umat seolah berjalan tanpa sentuhan solusi ilmiah. Fenomena "menara gading" ini mengindikasikan perlunya rekonstruksi radikal terhadap paradigma

³⁴ Seyyed Hossein Nasr, *Sains dan Peradaban dalam Islam*, terj. Javan Mahjuddin (Bandung: Pustaka, 2018), hlm. 45.

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kompleks Al-Qur'an, 2019), hlm. 106.

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kompleks Al-Qur'an, 2019), hlm.394

³⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 210.

keilmuan kontemporer agar tidak terjebak dalam egosentrisme akademik, melainkan bergeser menuju paradigma yang lebih humanis dan berorientasi pada pemecahan masalah umat (*problem-solving oriented*).

Dalam upaya menjembatani kesenjangan tersebut, M. Amin Abdullah menawarkan gagasan mengenai pentingnya paradigma keilmuan integratif interkoneksi. Paradigma ini menuntut agar penelitian akademik tidak lagi mengisolasi diri dalam sekat-sekat disiplin ilmu yang kaku dan mandek pada tataran konseptual. Sebaliknya, ilmu pengetahuan harus membuka diri, saling berdialog, dan terkoneksi langsung dengan realitas empiris demi melahirkan solusi praktis yang multidimensional terhadap berbagai krisis kemanusiaan.³⁸ Melalui kacamata integratif-interkoneksi ini, pengabdian masyarakat diakui bukan sebagai beban eksternal, melainkan sebagai bentuk manifestasi tertinggi dari tanggung jawab sosial, moral, dan spiritual seorang ilmuwan Muslim yang menyatukan antara zikir, pikir, dan amal saleh.

Tanggung Jawab Sosial Ilmuwan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu

Dalam diskursus filsafat ilmu, tanggung jawab sosial ilmuwan bukanlah isu periferal (pinggiran), melainkan bagian inti dari dimensi aksiologi sebuah cabang filsafat yang secara khusus mengkaji hakikat nilai, kegunaan, dan orientasi etis dari ilmu pengetahuan. Pertanyaan mendasar yang selalu diajukan dalam ranah ini adalah apakah ilmu pengetahuan dikembangkan hanya demi pemuasan syahwat akademik di ruang-ruang laboratorium terisolasi, atau ia justru mengemban imperatif moral untuk memberikan manfaat konkret bagi transformasi sosial masyarakat. Aksiologi menegaskan bahwa ilmu tidak pernah bebas nilai (*value-free*); setiap aktivitas pencarian kebenaran ilmiah selalu terikat oleh tanggung jawab etis terhadap kemanusiaan.³⁹

Gagasan mengenai keterikatan ilmu dengan nilai-nilai kemanusiaan ini sejalan dengan pemikiran tokoh Teori Kritis, Jürgen Habermas. Ia mengemukakan tesis terkenal bahwa ilmu pengetahuan tidak pernah lahir dari ruang hampa, melainkan selalu berkelindan erat dengan kepentingan manusia (*knowledge-constitutive interests*). Menurut Habermas, ilmu yang sejati tidak boleh mandek pada fungsi teknis-instrumental semata, melainkan harus melangkah menuju fungsi emansipatoris. Artinya, ilmu yang baik adalah ilmu yang memiliki daya reflektif untuk membebaskan manusia dari belenggu penindasan, struktur ketidakadilan, dan berbagai bentuk dominasi sosial yang mendistorsi kemanusiaan.⁴⁰ Oleh karena itu, ilmuwan memikul kewajiban moral yang inheren untuk memastikan bahwa seluruh hasil penelitian risetnya diproyeksikan demi kemaslahatan publik, bukan menjadi alat legitimasi bagi kekuasaan yang opresif.

Seiring dengan pesatnya lompatan saintifik di era modern, tanggung jawab sosial tersebut tidak hanya berlaku untuk dimensi ruang (sosial masa kini), tetapi juga merambah ke dimensi waktu (masa depan). Dalam konteks ini, Hans Jonas mengembangkan konsep etika visioner yang disebut *The Imperative of Responsibility* (Imperatif Tanggung Jawab). Jonas menekankan sebuah prinsip etis baru: setiap derap perkembangan ilmu dan teknologi hari ini wajib mempertimbangkan dampak eksistensialnya secara jangka panjang terhadap kelangsungan hidup generasi yang akan datang.⁴¹ Konsep ini menemukan relevansi krusialnya di era kontemporer, di mana disrupsi teknologi seperti kecerdasan buatan (AI),

³⁸ M. Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkoneksi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 124-126.

³⁹ Amsal Bakhtiar, *Filsafat Ilmu* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 165-167.

⁴⁰ Jürgen Habermas, *Knowledge and Human Interests*, terj. Jeremy J. Shapiro (Boston: Beacon Press, 1971), hlm. 308-310.

⁴¹ Hans Jonas, *The Imperative of Responsibility: In Search of an Ethics for the Technological Age* (Chicago: University of Chicago Press, 1984), hlm. 11-14.

rekayasa genetika, hingga eksploitasi industri berkembang jauh lebih cepat mengungguli kalkulasi dan kesiapan manusia dalam mengantisipasi dampak etis serta ekologisnya. Ilmuwan dipaksa untuk bertindak sebagai penjaga masa depan peradaban.

Ketika paradigma filsafat Barat ini dipertemukan dengan epistemologi Islam, konsep tanggung jawab sosial ilmuwan mendapatkan perluasan makna yang sangat fundamental. Dalam perspektif Islam, tanggung jawab seorang ilmuwan (*'alim*) tidak bersifat reduksionis-horizantal kepada sesama manusia semata, melainkan berpucuk secara vertikal kepada Allah Swt. sebagai Sang Sumber Ilmu (*Al-'Alim*). Ilmu dalam Islam dipandang sebagai amanah teologis, bukan hak milik absolut sang pemikir. Konsekuensinya, setiap ilmuwan Muslim memikul beban akuntabilitas ganda: ia bertanggung jawab atas ketepatan metodologis ilmunya di dunia, sekaligus akan dimintai pertanggungjawaban metafisis di akhirat mengenai bagaimana ilmu tersebut diamankan untuk menolong sesama.

Kesadaran eskatologis ini berakar kuat pada peringatan profetik dari Rasulullah Saw. dalam sebuah sabdanya:

"Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang empat perkara: tentang umurnya untuk apa dihabiskan, tentang ilmunya bagaimana ia mengamalkannya, tentang hartanya dari mana diperoleh dan ke mana dibelanjakan, serta tentang tubuhnya untuk apa digunakan."⁴²

Eksplisit dalam hadis ini, aspek "bagaimana ilmu diamankan" menjadi salah satu pilar interogasi ketuhanan di hari pembalasan. Pesan tekstual ini menegaskan bahwa dalam tradisi Islam, seorang ilmuwan tidak cukup hanya dibekali oleh kecerdasan intelektual (*intellectual quotient*) yang genius, melainkan wajib mengintegrasikannya dengan integritas moral-spiritual (*spiritual quotient*) yang kokoh. Kepakaran tanpa ketakwaan hanya akan melahirkan kesombongan epistemis yang berbahaya.

Oleh karena itu, sebagaimana digariskan oleh Osman Bakar, ilmu pengetahuan di dalam Islam tidak pernah netral secara etis, melainkan selalu berkelindan dengan *telos* (tujuan) moral, yaitu menciptakan harmoni yang kosmologis antara manusia, alam semesta, dan Tuhan. Islam menolak keras sekularisasi ilmu yang memisahkan antara fakta empiris dan nilai ketuhanan. Ilmu yang dengan sengaja mengabaikan dimensi etik-spiritual akan kehilangan kompas kemanusiaannya, mengalami disorientasi, dan pada puncaknya berpotensi besar merosot menjadi instrumen eksploitasi yang destruktif terhadap alam serta merendahkan martabat manusia itu sendiri.⁴³ Integrasi antara etika dan sains inilah yang menjadi kunci utama bagi lahirnya ilmuwan Muslim yang profetik, yang ilmunya menjadi rahmat bagi sekalian alam (*rahmatan lil 'alamin*).

Tantangan Etika Keilmuan Muslim Di Era Artificial Intelligence (Ai)

Akselerasi eksponensial dari perkembangan *Artificial Intelligence* (AI), *Big Data*, *Internet of Things* (IoT), dan ekosistem teknologi digital kontemporer telah membawa disrupti sekaligus transformasi masif terhadap lanskap pendidikan tinggi dan metodologi penelitian ilmiah. Pada satu dimensi, kehadiran generator berbasis AI memberikan efisiensi yang belum pernah ada sebelumnya dalam hal automasi pengolahan data berskala besar, akselerasi pencarian referensi silang, penerjemahan bahasa yang presisi, hingga pendampingan teknis penyusunan draf naskah ilmiah. Namun, di balik lompatan fungsional tersebut, AI bertindak bak pisau bermata dua yang menghadirkan tsunami persoalan etik-epistemologis pelik, yang apabila diabaikan, berpotensi mereduksi nilai-nilai hakiki

⁴² Hadis Riwayat At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Kitab Sifat al-Qiyamah wa al-Raqa'iq wa al-Wara', No. 2417. (Dinyatakan sahih oleh Al-Albani).

⁴³ Osman Bakar, *Tauhid dan Sains: Esai-Esai tentang Sejarah dan Filsafat Sains Islam*, terj. Yuliani Liputo (Bandung: Pustaka Hidayah, 2008), hlm. 89-92.

kemanusiaan dan meruntuhkan marwah dunia akademik.⁴⁴

Salah satu manifestasi krisis etik yang paling kentara dalam aktivitas keilmuan saat ini adalah eskalasi praktik plagiarisme gaya baru berbasis teknologi generatif (*AI-generated plagiarism*). Kemampuan algoritma tingkat lanjut dalam meramu teks, memparafrase ide, dan memproduksi artikel ilmiah imitasi yang sangat mirip dengan karya tulen manusia telah menciptakan wilayah abu-abu (*grey area*) dalam pendefinisian orisinalitas karya. Ketika seorang peneliti atau akademisi menggunakan jalan pintas algoritma ini tanpa transparansi dan proses verifikasi yang ketat, terjadi degradasi integritas akademik yang masif. Pada titik nadir, ketergantungan akut pada AI ini lambat laun akan mematikan daya nalar, mengikis sensitivitas intuisi ilmiah, serta melumpuhkan budaya berpikir kritis dan kreativitas orisinal yang sejatinya merupakan modal utama ilmuwan Muslim.⁴⁵

Lebih jauh lagi, krisis etika di era digital ini tidak berhenti di balik dinding laboratorium akademik, melainkan telah meluber ke ruang publik dalam bentuk distorsi informasi skala global. Masifnya penyebaran berita palsu (*hoaks*) yang diamplifikasi oleh algoritma media sosial, teknologi manipulasi citra dan suara super-realistis (*deepfake*), komersialisasi dan pelanggaran privasi data pribadi, hingga bias algoritma yang melanggengkan diskriminasi sosial, menjadi bukti empiris yang tak terbantahkan bahwa lompatan kemajuan teknologi tidak otomatis linier dengan kemajuan moralitas kemanusiaan. Fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan tajam antara kecerdasan buatan yang semakin canggih (*smart*) dengan kebijaksanaan moral manusia yang justru mengalami pendangkalan (*decline*).

Kondisi anomali ini sejalan dengan kritik kebudayaan yang sering dilontarkan oleh pemikir tradisional Islam, Seyyed Hossein Nasr. Ia menegaskan bahwa akar krisis terbesar yang melanda peradaban dunia modern sejatinya bukanlah terletak pada kekurangan instrumen atau keterbatasan teknologi, melainkan pada hilangnya dimensi spiritual-metafisis dan desakralisasi dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan itu sendiri.⁴⁶ Sains dan teknologi modern telah kehilangan kompas transendentalnya. Oleh sebab itu, dalam menyikapi gelombang kecerdasan buatan, AI harus diletakkan kembali pada posisi ontologisnya yang sejati, yaitu sekadar sebagai *khadim* (alat pembantu) yang memperluas kapasitas teknis manusia, dan secara mutlak tidak boleh menggeser atau menggantikan kedudukan manusia sebagai agen moral (*moral agent*) yang memikul tanggung jawab eksistensial.

Agar pemanfaatan teknologi digital ini tidak membawa manusia ke arah kehancuran peradaban, epistemologi Islam menawarkan kerangka etis-aksiologis yang komprehensif. Tradisi keilmuan Islam mengharuskan setiap inovasi dan adopsi alat teknologi bertumpu pada lima pilar pedoman etik utama yang bersumber dari nilai-nilai profetik, antara lain:

1. Masalahah (Kemanfaatan Luas): Inovasi dan penggunaan sistem AI wajib diarahkan demi kemaslahatan umum, mempermudah kehidupan, serta meminimalisasi potensi bahaya (*dar'ul mafasid*) bagi umat manusia dan lingkungan.
2. 'Adālah (Keadilan): Algoritma dan pemrosesan data berbasis AI harus bebas dari bias, tidak diskriminatif, serta menjamin distribusi akses teknologi yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang sosial-ekonomi.

⁴⁴ Yudho Giri Sucahyo, *Dilema Etika dan Hukum di Era Kecerdasan Buatan* (Jakarta: UI Press, 2024), hlm. 72-75.

⁴⁵ Husain Heriyanto, *Paradigma Pemikiran Sains Islam: Menjawab Tantangan Degradasi Moral Modernitas* (Jakarta: Sadra Press, 2021), hlm. 143.

⁴⁶ Seyyed Hossein Nasr, *Sains dan Peradaban dalam Islam*, terj. Javan Mahjuddin (Bandung: Pustaka, 2018), hlm. 201-204.

3. *Amānah* (Tanggung Jawab): Ilmuwan Muslim wajib memikul akuntabilitas penuh atas input data, proses pemodelan, hingga output yang dihasilkan oleh AI, termasuk menjaga kerahasiaan dan hak privasi individu.
4. *Ṣidq* (Kejujuran): Menuntut adanya transparansi radikal (*explainable AI*) mengenai keterlibatan instrumen kecerdasan buatan dalam proses akademis, serta tidak memanipulasi data objektif demi kepentingan pragmatis.
5. *Iḥsān* (Profesionalisme dan Kualitas Terbaik): Memanfaatkan AI sebagai sarana untuk mencapai standar kualitas karya ilmiah tertinggi, bukan sebagai kedok kepalsuan untuk menyembunyikan kemalasan intelektual.

Melalui internalisasi kelima prinsip ini, ilmuwan Muslim di era digital tidak akan gagap atau sekadar menjadi konsumen pasif dari kemajuan zaman. Sebaliknya, mereka mampu memimpin orkestrasi pemanfaatan *Artificial Intelligence* secara bijaksana, menundukkan teknologi di bawah bimbingan wahyu, dan menjadikannya sarana pengabdian yang memperkuat martabat manusia di hadapan Sang Pencipta.⁴⁷

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam tradisi intelektual Islam, ilmu pengetahuan tidak bersifat bebas nilai (*value free*), melainkan sebuah amanah teologis dan teosentris yang bersumber dari Allah Swt. (*Al-'Alim*). Oleh karena itu, ilmu tidak boleh berhenti pada tataran teoritis-akademis atau sekadar menjadi komoditas pragmatis-ekonomis demi mengejar publikasi semata, melainkan wajib ditransformasikan menjadi amal nyata (*action-oriented science*) yang memberikan kemaslahatan (*maslahah*) bagi umat manusia.

Melalui tiga dimensi utama filsafat ilmu ontologi, epistemologi, dan aksiologi, kajian ini secara tegas mengkritik pandangan positivisme modern yang memisahkan sains dari moral. Secara aksiologis, ilmu mengemban misi luhur untuk meningkatkan martabat manusia, sehingga para ilmuwan memikul tanggung jawab sosial yang bersifat ganda, yakni secara horizontal kepada sesama manusia dan vertikal kepada Allah Swt. Implementasi nyata dari tanggung jawab profetik ini diwujudkan melalui pengabdian masyarakat sebagai bagian integral dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang berfungsi untuk menjembatani kesenjangan (*gap*) antara dunia menara gading universitas dengan pemecahan problem riil di tengah umat melalui pendekatan integratif-interkoneksi agar ilmuwan tidak terisolasi dari realitas empiris.

Urgensi etika keilmuan ini menjadi semakin krusial di era digital saat ini, mengingat kehadiran *Artificial Intelligence* (AI) membawa disrupsi berupa krisis moral seperti plagiarisme gaya baru (*AI-generated plagiarism*), manipulasi data, bias algoritma, hingga hilangnya dimensi spiritual dalam sains. Menghadapi tantangan kontemporer tersebut, AI harus diposisikan secara proporsional hanya sebagai alat (*khadim*) pembantu manusia, bukan pengganti agen moral. Pemanfaatan seluruh instrumen teknologi digital ini pun wajib bersandar secara kokoh pada lima pilar etika Islam kontemporer, yaitu *Maslahah* (kemanfaatan luas), *ʿAdālah* (keadilan), *Amānah* (tanggung jawab), *Ṣidq* (kejujuran), dan *Iḥsān* (profesionalisme dan kualitas terbaik) demi mewujudkan peradaban yang beradab dan berkelanjutan.

⁴⁷ Zainal Abidin Bagir, *Sains, Teknologi, dan Agama dalam Perspektif Islam Kontemporer* (Yogyakarta: CRCs UGM, 2023), hlm. 98-102.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin. (2006). *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. (1991). *Konsep Adab dan Krisis Keilmuan Kontemporer*.
- Al-Faruqi, Ismail Raji. (1982). *Islamization of Knowledge (Islamisasi Ilmu Pengetahuan)*.
- Bagir, Zainal Abidin. (2023). *Sains, Teknologi, dan Agama dalam Perspektif Islam Kontemporer*. Yogyakarta: CRCS UGM.
- Bakar, Osman. (2008). *Tauhid dan Sains: Esai-Esai tentang Sejarah dan Filsafat Sains Islam*. Terjemahan oleh Yuliani Liputo. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Bakhtiar, Amsal. (2012). *Filsafat Ilmu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Departemen Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kompleks Al-Qur'an.
- Giri Sucahyo, Yudho. (2024). *Dilema Etika dan Hukum di Era Kecerdasan Buatan*. Jakarta: UI Press.
- Habermas, Jürgen. (1971). *Knowledge and Human Interests*. Terjemahan oleh Jeremy J. Shapiro. Boston: Beacon Press.
- Heriyanto, Husain. (2021). *Paradigma Pemikiran Sains Islam: Menjawab Tantangan Degradasi Moral Modernitas*. Jakarta: Sadra Press.
- Jonas, Hans. (1984). *The Imperative of Responsibility: In Search of an Ethics for the Technological Age*. Chicago: University of Chicago Press.
- Nasr, Seyyed Hossein. (2018). *Sains dan Peradaban dalam Islam*. Terjemahan oleh Javan Mahjuddin. Bandung: Pustaka.
- Popper, Karl. (1959). *The Logic of Scientific Discovery*. London: Hutchinson & Co.
- Soekanto, Soerjono. (2015). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.